

GLOBALISASI EKONOMI, BUDAYA KAPITALIS DAN DEMOKRASI

Mikhael Dua

Abstract

Globalization, as Anthony Giddens defines it, denotes a shift in the spatial form of human organization and activity to transcontinental or inter-regional patterns of activity, interaction and exercise of power. Under the spirit of capitalism, it can destroy our jobs, hollow out the decision-making power of government, and even threaten the nation-state as the nub of our kind of democracy. Critics of globalization worry about the inability of governments to set their own economic policies. They also worry about the increased power of financial markets to cause economic havoc. Looking at the ethical proposal to this problematic context, this article proposes that we move from an ethical study of the rational foundations of moral norms to a political reflection on the democratic construction of social norms. In such democratic construction, the plurality of views of life will be protected against overweening global capitalism.

Kata-kata kunci: Globalisasi, kapitalisme, etika, demokrasi

Pendahuluan

Globalisasi ekonomi telah menjadi sebuah istilah dengan gaung yang luas pada akhir abad lalu dan permulaan abad ini. Didukung oleh teknologi komunikasi dan transportasi, globalisasi di satu sisi dapat meningkatkan produktivitas dan standar kehidupan, karena modal akan bergerak dengan lebih mudah ke pelbagai negara yang memiliki opportunitas lebih menguntungkan, namun di sisi lain dapat menimbulkan instabilitas nasional dan dunia internasional baik dalam bidang politik maupun bidang ekonomi itu sendiri. Terutama, proses globalisasi tersebut dapat memperlemah kekuasaan pemerintah untuk mengambil keputusan-keputusan yang berkenaan dengan pengembangan demokrasi dan peningkatan kesejahteraan.

Dengan alasan-alasan tersebut, globalisasi ekonomi dikritik. Banyak

ahli meramalkan bahwa banyak negara sedang berkembang dipaksa untuk mengabaikan tugas sosial dan kontrol lingkungan untuk tujuan-tujuan kompetitif. Para pengkritik juga mengarah pada tumbuhnya pasar uang yang menyebabkan bencana ekonomi sebagaimana terjadi di Eropa tahun 1992-1993, Meksiko tahun 1994-1995, Asia Tenggara tahun 1997-1998, dan beberapa tahun terakhir ini di Amerika Serikat dan Eropa. Mencermati kenyataan tersebut Joseph E. Stiglitz menegaskan bahwa banyak negara harus menghadapi dua isu penting berikut ini. Yang pertama adalah kemiskinan. Dalam catatan Stiglitz, Afrika merupakan wilayah yang paling tereksplotasi dengan adanya globalisasi, menyusul Amerika Latin dan Rusia.¹ Stiglitz berpendapat bahwa globalisasi ekonomi memang dapat membawa kesejahteraan, tetapi kesejahteraan tersebut hanya ada pada negara-negara yang lebih kompetitif, karena dalam kenyataannya globalisasi memicu suatu kondisi yang timpang, baik di negara maju maupun negara berkembang. Yang kedua adalah melemahnya fungsi-fungsi negara bangsa dengan akibat negara tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya seperti menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kondisi seperti ini, menurut Stiglitz, negara perlu memiliki tugas baru yaitu mencegah monopoli dalam meletakkan landasan sistem pengaman sosial modern dan dalam menerapkan peraturan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan. Jika hal ini dapat dilaksanakan maka negara memiliki kapabilitas sebagai sebuah negara bangsa. Namun, hal ini pada kenyataannya tidak terjadi, karena globalisasi telah membiarkan kekuatan pasar sedemikian rupa sehingga tidak mampu dikendalikan secara sendiri-sendiri oleh pemerintah negara sedang berkembang.²

Menyentuh persoalan-persoalan tersebut, tulisan ini mencoba mengangkat dua hal. Yang pertama mendeskripsikan proses globalisasi ekonomi itu sendiri dan yang kedua membuat sebuah refleksi filsafat, terutama dari segi etika, terhadap proses globalisasi ekonomi tersebut. Dengan menyentuh kedua titik persoalan ini tulisan ini selain bertujuan memberikan sebuah deskripsi mengenai globalisasi ekonomi, juga membangun refleksi mengenai implikasi-implikasi penting proses globalisasi tersebut, terutama berkaitan dengan akar globalisasi tersebut yaitu budaya kapitalisme.

Globalisasi: Fenomena Sosial dan Ekonomi

Globalisasi sebenarnya merupakan sebuah fenomena sosial yang

¹ Joseph E. Stiglitz, *Making Globalization Work*, sebuah terjemahan Indonesia oleh Edrijani Azwardi (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), hlm. 58-58.

² *Ibid.*, hlm. 69-70.

netral. Anthony Giddens pernah menulis mengenai globalisasi sebagai berikut: “Globalisasi adalah sebuah nama untuk menjelaskan sebuah loncatan dalam ruang organisasi dan aktivitas manusia menuju pola aktivitas, interaksi dan kekuasaan transkontinental dan inter-regional.”³ Dengan deskripsi ini Giddens ingin menegaskan bahwa globalisasi merupakan sebuah proses pendalaman relasi dan institusi sosial dalam ruang dan waktu sehingga menjadi nyata bahwa kehidupan sehari-hari mendapat pengaruh dunia lain dan setiap komunitas lokal mendapat makna global.

Apa yang ingin dikatakan Giddens tersebut dirumuskan oleh Goldblatt dengan cara lain. Globalisasi, demikian Goldblatt, menunjuk pada dua fenomena: “Pertama, globalisasi mengusulkan agar aktivitas sosial, ekonomi, dan politik mendunia, kedua, intensifikasi interaksi dan interkoneksi dalam dan antara negara dan masyarakat.”⁴ Pernyataan Goldblatt tersebut di atas menarik perhatian karena dapat dilihat sebagai sebuah kerangka untuk menjelaskan fenomena globalisasi dalam pelbagai perspektif. Pertama, globalisasi dapat dilihat sebagai pencetus bagi kemudahan aliran modal secara tak terbatas ke negara-negara yang membutuhkannya sambil mendorong usaha untuk meningkatkan efisiensi ekonomi di negara-negara yang selama ini justru tidak efisien pengelolaan keuangannya. Kedua, dilihat dari perspektif politik, globalisasi memungkinkan setiap negara mengembangkan demokrasi sebagai syarat bagi kebebasan berusaha dan berekspresi. Ketiga, dari segi sosial, globalisasi memungkinkan aliran informasi, kontak pribadi dan apresiasi kultural antara negara.

Dengan demikian, globalisasi merupakan sebuah fenomena historis yang tidak tunggal. Akibatnya, setiap negara memiliki pengalaman sendiri-sendiri sehingga kita tidak dapat mengatakan bahwa globalisasi memiliki proses dan hasil yang sama di banyak negara. Dalam globalisasi, lokalitas memiliki sumbangan tertentu pada kehidupan global. Demikian sebaliknya, kehidupan lokal mendapat sentuhan global sedemikian rupa sehingga setiap masyarakat yang memiliki identitas historis dan kultural tertentu dapat membuka diri bagi identitas kultural lain. Melalui gerakan timbal balik antara lokalitas dan globalitas tersebut globalisasi menjadi sebuah fenomena multidimensional yang melibatkan bermacam-macam

³ Anthony Giddens, *The Consequences of Modernity* (Cambridge: Polity Press, 1990), hlm. 64 sebagaimana dikutip dari Luc van Liedekerke, “Economic Globalization: The Political Challenge” dalam *Ethical Perspectives* Vol. 7, No. 1 Tahun 2000: hlm. 37.

⁴ D. Goldblatt et.al., *Global Flows and Global Transformations: Concepts, Arguments and Evidence* (Cambridge: Polity Press, 1998: hlm. 14 sebagaimana dikutip dari Luc van Liedekerke, *op.cit.*, hlm. 38.

bidang kegiatan dan interaksi: ekonomi, politik, teknologi, militer, hukum, kebudayaan, dan lingkungan. Setiap bidang memiliki pola yang berbeda-beda dalam aktivitas dan relasi – dan masing-masingnya memiliki logika dan implikasi bagi bidang-bidang lain.

Yang paling menonjol dari antara aktivitas-aktivitas yang mengandung dimensi global, motif-motif ekonomi menentukan proses globalisasi. Di atas kertas, globalisasi ekonomi bahkan membangun dirinya sebagai sistem ekonomi dunia, sebagaimana diperkokoh dengan kesepakatan dan aturan yang dibuat oleh WTO (World Trade Organization), GATT (General Agreement on Tariffs and Trades), dan GATS (General Agreement on Trade in Services). Melalui pengaturan formal tersebut, motif-motif ekonomi untuk maksimalisasi kapital dalam semangat kebebasan berusaha dan kompetisi dapat membuka batas-batas negara dan ruang-ruang ideologis. Dalam semangat baru ini, integrasi ekonomi nasional tidak lagi ditentukan oleh nasionalisme sempit tetapi ditentukan oleh seberapa besar perdagangan, investasi, dan modal keuangan mengalir keluar batas-batas negara. Gejala-gejalanya adalah: konsumen membeli lebih banyak barang asing, banyak perusahaan dapat dengan mudah beroperasi di luar batas-batas sebuah negara, dan individu dapat berinvestasi lebih banyak dari sebelumnya di tempat-tempat yang jauh.

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan sebuah kecenderungan bahwa relasi global memiliki pengaruh yang besar dalam aktivitas-aktivitas ekonomi. Jika sebelumnya ekonomi ditentukan oleh ideologi pembangunan nasional dan kepentingan-kepentingan nasional, dengan globalisasi banyak perusahaan mengambil langkah-langkah ‘lintas batas’ untuk pengembangan produksi, sumber daya, pemasaran, dan aktivitas keuangan. Karena itu, sepintas kita dapat mengatakan bahwa globalisasi merupakan fenomena mikro ekonomi, di mana setiap perusahaan berusaha mengungkapkan dimensi internasionalitas organisasi dan tingkahlaku strategis dirinya sendiri. Dalam cita-cita Giddens dan Goldblatt, globalisasi memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengambil posisi kompetitif dengan menciptakan semacam *global web* sehingga nilai dan kekayaan perusahaan dapat diproduksi dan didistribusikan. Dengan predikat global, sebuah perusahaan tidak dengan sendirinya melenyapkan diri sebagai sebuah perusahaan nasional, tetapi sebaliknya, perusahaan tersebut ditata dengan sebuah strategi terintegrasi secara global agar berfungsi dengan baik dalam banyak bidang: manajemen keuangan, penelitian dan pengembangan sebagai sumber dan tujuan ekspansi bisnis. Dengan predikat global, sebuah perusahaan tidak hanya menjadi lebih kompetitif tetapi juga

memiliki kemungkinan untuk mengambil peran lebih besar dalam sektor industrial. Dengan tingkat interdependensi, konflik, pembentukan dan perluasan *network* yang semakin lama semakin global, setiap perusahaan akan semakin menyadari apa artinya keseluruhan, *sphere*, dan *network* yang semakin mencakup semua elemen.

Budaya Kapitalisme di Balik Globalisasi

Meskipun di atas kertas globalisasi ekonomi menampakkannya dirinya dalam risalah-risalah, undang-undang dan bahkan agensi internasional, intensi globalisasi tetap sulit diungkapkan. Dalam proses globalisasi ekonomi itu terdapat mekanisme adaptasi dan eksploratif yang bisa gagal dan bisa berhasil, sehingga tidak dapat menampilkan diri sebagai sebuah keseluruhan sistem yang jelas di mata banyak orang. Karena itu tidak heran jika Christian Arnsperger, dalam artikelnya yang berjudul “Comment peut-on être alter-mondialiste? Cosmopolitanism and the resistance to capitalism”⁵ melukiskan proses globalisasi sebagai sebuah pengalaman tentang dunia yang sedang berlari kejang untuk sebuah tujuan yang tidak kita ketahui secara pasti (*runaway world*). Dunia global tersebut menjadi semacam *sphere* yang sulit ditolak. Setiap orang mau tidak mau menerimanya, beradaptasi dengannya, dan jika mampu, mengubahnya sedemikian rupa untuk meningkatkan keterbukaan dan mobilitas modal.

Inti dari *sphere* globalisasi tersebut adalah kapitalisme sebagai sebuah sistem budaya internasional yang menentukan cara berpikir masyarakat dunia. Arnsperger menjelaskan bahwa di balik dominasi pertukaran barang dan jasa, globalisasi mengembangkan dirinya sebagai sebuah sistem budaya yang didukung oleh politik-kepentingan dan kluster-kluster kekuatan ekonomi. Dinamika globalisasi ekonomi, demikian Arnsperger, tidak berkembang seperti dinamika evolusi biologis. Jika dalam evolusi biologis proses adaptasi dengan lingkungan alam memainkan peranan penting sehingga kondisi biologis makhluk-makhluk hidup disesuaikan dengan tuntutan lingkungan alam, seluruh dinamika globalisasi ekonomi ditentukan oleh budaya kapitalisme yang menawarkan nilai seperti efisiensi, maksimalisasi kapital, dan komodifikasi pengalaman-pengalaman manusia. Dengan nilai-nilai tersebut globalisasi ekonomi dapat saja mengabaikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat-masyarakat lokal seperti gotong-royong, loyalitas pada keluarga, dan penghargaan terhadap pengalaman manusia sebagai sesuatu yang sakral. Sumber pertentangan justru terjadi ketika

⁵ Christian Arnsperger, “Comment peut-on être alter – mondialiste? Cosmopolitanism and the Resistance to Capitalism” *Ethical Perspectives* Vol. 13 No. 4, Tahun 2006: hlm. 647-672.

nilai-nilai ekonomi memaksakan dirinya dalam masyarakat lokal yang masih menilai tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan kesucian alam dan manusia.⁶

Apa yang dikemukakan oleh Arnsperger tentang pertentangan nilai antara globalisasi ekonomi dan nilai-nilai masyarakat lokal sebenarnya diakui juga oleh para pendukung globalisasi ekonomi seperti Milton Friedman. Friedman sendiri berargumentasi bahwa di bawah kapitalisme, globalisasi ekonomi menyanggah nilai yang bisa saja tidak sejalan dengan apa yang dijunjung tinggi masyarakat. Namun, Friedman menambahkan bahwa globalisasi ekonomi perlu dilihat sebagai prioritas. Dalam rumusannya yang sedikit sarkastis, Friedman menegaskan bahwa demi cita-cita kapitalisme, “Sikap tidak bertanggungjawab bertumbuh dalam sistem”⁷ dalam arti bahwa kapitalisme akan berhasil justru ketika setiap eksekutif dan manajer perusahaan tidak perlu peduli dengan dimensi sosial perusahaan. Bagi Friedman, globalisasi ekonomi hanya mengenal logika: *supple and forward looking*. Artinya, meskipun tetap dituntut menjadi sensitif pada kepentingan-kepentingan masyarakat lokal, demi kepentingan jangka panjang sebuah perusahaan tidak perlu menerima tanggung jawab atas dampaknya pada masyarakat. Yang harus dihindari adalah tindakan-tindakan kriminal seperti korupsi dan lain-lain. Dengan perkataan lain, perusahaan tidak wajib memiliki akuntabilitas terhadap masyarakat luas kecuali pada para pemilik modal. Nilai kebebasan dan tanggung jawab ditempatkan di bawah prinsip efisiensi dan keuntungan. Kegiatan memaksimalkan keuntungan bukanlah tindakan kerakusan. Tindakan tersebut dapat dibenarkan secara moral oleh kapitalisme karena dengan meningkatkan keuntungan, setiap perusahaan dapat meningkatkan surplus kekayaan negara yang dapat digunakan lagi sebagai modal untuk dikembangkan dalam proses produksi. Seluruh tindakan *forward looking* tersebut dilaksanakan dalam semangat kompetisi pasar.

Nilai-nilai budaya kapitalisme dimaksud tidak dimiliki oleh setiap masyarakat mana pun. Sebagai kesatuan sosial setiap masyarakat memiliki tanggung jawab riil agar setiap individu memiliki pekerjaan untuk dapat hidup, mengembangkan tanggung jawab terhadap hidupnya sendiri dan relasinya dengan orang lain, terhadap apa yang mereka capai (pengetahuan, keindahan, dan kebajikan), terhadap masa depan (generasi yang akan datang) dan terhadap kesucian hidup yang memiliki makna religius. Dengan mengejar keuntungan dan mengabaikan nilai-

⁶ *Ibid.*

⁷ Dikutip oleh William Greider, *The Soul of Capitalism, Opening Paths to a Moral Economy* (New York: Simon & Schuster, 2003), hlm. 36.

nilai sosial tersebut, globalisasi ekonomi dan budaya kapitalisme tersebut dapat menimbulkan depresi besar yang menimbulkan politik fasis yang keras dan irasional.⁸

Selain memiliki karakter ‘tidak bertanggungjawab terhadap nilai-nilai sosial’, globalisasi ekonomi membangun dirinya dalam sistem politik dan kekuasaan. Menggantikan proses adaptasi kreatif, evolusi ekonomi global didorong oleh motif kekuasaan. Dalam budaya kapitalisme, modal tidak lagi sekedar aset untuk tujuan-tujuan produksi tetapi menjadi dasar relasi sosial yang memiliki kaitannya dengan struktur kekuasaan politik tertentu. Dengan demikian dapat terjadi sebuah kolusi antara elite politik dan elite ekonomi. Hasil dari proses kolusi tersebut adalah munculnya apa yang sudah diramalkan Karl Marx konsentrasi kekuatan ekonomi pada sekelompok kecil orang yang memiliki kekuatan ekonomi sekaligus politik. Dalam relasi sosial tersebut, setiap orang dengan kepentingan yang beragam dikoordinasi oleh ideologi atau norma politik deliberasi, aspirasi dan persepsi tentang peranan masing-masing dalam keseluruhan *network* relasi sosial. Namun, model politik yang sangat menghargai deliberasi tidak memiliki arah pengembangan masyarakat berdasarkan aspirasi-aspirasi kulturalnya tetapi menjadi *sphere* untuk memperkuat konsentrasi kekuatan ekonomi.

Dunia Kerja, Keuangan, dan Pola Konsumsi

Secara konkret, globalisasi ekonomi menentukan nilai dan pola interaksi tertentu dalam tiga bidang yaitu dunia kerja, keuangan, dan pola konsumsi sebuah masyarakat. Karangan William Greider yang berjudul *The Soul of Capitalism* di Amerika Serikat mencoba merinci secara konkret penetrasi budaya kapitalisme ini dalam ketiga bidang tersebut.⁹

Yang pertama adalah dunia kerja. Dalam rangka mencari sesuap nasi (*earning a living*), banyak orang Amerika pergi bekerja dan karena itu mendapat banyak hak berdasarkan konstitusi yang mereka miliki seperti hak untuk mendapatkan gaji yang pantas, asuransi kesehatan, bahkan hak untuk memberikan penilaian profesional berkaitan dengan bidang keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Hak-hak tersebut tidak hanya didukung oleh konstitusi, tetapi didukung juga oleh kontrak

⁸ Studi yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Etika telah sampai pada kesimpulan ini, ketika para stafnya mendalami pemikiran Karl Polanyi. Hasil studi dapat dilihat dalam *Respons, Jurnal Etika Sosial* Vol. 15 - No.01 dan 02 tahun 2010. Secara khusus tulisan Rodemeus Ristyantoro yang berjudul “Evolusi Pasar: Dari Pasar Tertanam ke Pasar Tercerabut Perspektif Karl Polanyi” mengungkapkenyataan ini.

⁹ William Greider, *The Soul of Capitalism, Opening Paths to a Moral Economy*, *op.cit.*, bab 3, 4, dan 5.

kerja dengan perusahaan tempat mereka bekerja. Akan tetapi, pada kenyataannya begitu memasuki pintu pabrik atau kantor, banyak orang Amerika harus menghadapi kenyataan bahwa mereka 'terhalang' untuk mengambil bagian dalam keputusan-keputusan penting menyangkut pekerjaan mereka sendiri. Hak-hak konstitusi seperti hak untuk berbicara dan kebebasan berkumpul secara efektif tidak jalan. Dan lebih menarik lagi, banyak pekerja mengalami keraguan mengenai elemen-elemen penting mengenai dirinya sendiri. Ada kesan menonjol bahwa hubungan kerja ditandai dengan relasi tuan-hamba, persis seperti pada masyarakat feodal. Konsep-konsep penting seperti hak, kualitas kerja, dan *rewards* baik yang *tangible* maupun yang *intangible* ditentukan oleh kehendak pemberi kerja. Greider mengatakan bahwa deskripsi ini tidak dapat dijelaskan dengan statistik karena pengalaman dunia kerja memiliki keragaman dan intensitas yang sangat luas dan mendalam. Sebaliknya, perubahan paradigma dunia kerja Amerika tersebut dapat dilihat dari beberapa contoh konkret di banyak perusahaan. Atas nama efisiensi, banyak perusahaan dapat dengan mudah melakukan rasionalisasi dunia kerja dengan mengurangi 10 hingga 20% tenaga kerja dan mengurangi honor kerja lebur. Diperkirakan 30% pekerja Amerika melaksanakan pekerjaan non standar seperti: pekerja sementara (*temp workers*), pekerja paruh waktu, tenaga kontrak, dan pekerja harian berdasarkan panggilan. Maka secara tidak langsung dunia kerja telah mengabaikan isu paling penting dalam pekerjaan yaitu identitas dan makna kerja. Kenyataan ini tidak hanya terjadi pada kelas buruh dan pekerja non standar, tetapi juga terjadi pada tingkat lebih tinggi yang menuntut profesi seperti insinyur, dokter dan pilot. Pada bidang profesi yang menuntut keahlian yang spesifik banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap konstitusi yang membuat mereka kehilangan respek dan kepercayaan. Dengan ilustrasi ini Greider menulis: "Kapitalisme industrial mengorganisasi pekerjaan menurut struktur piramida komando dengan jenjang yang berlapis-lapis, sama halnya dalam feudalisme, meskipun dengan logika yang lebih produktif dalam nama pembagian kerja. Susunan tersebut adalah artifak kapitalisme, bukan tatanan alamiah eksistensi manusia."¹⁰

Yang kedua adalah pengembangan keuangan. Jika kita mengatakan bahwa kapitalisme memiliki jiwanya, maka modal adalah entitas yang memiliki kualitas mistiknya. Substansi pengembangan keuangan memiliki wujudnya paling nyata dalam tabungan dan profit, yang berfungsi seperti oksigen, mengalir dan berkembang dalam saluran-saluran hati dan otot-otot kehidupan ekonomi. Secara teoritis, ilmu

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 58

ekonomi mengenal dengan baik sekali bahwa surplus kekayaan dapat dilihat sebagai salah satu dari 3 faktor produksi selain tenaga kerja dan alam. Dan hanya modallah yang membuat seseorang dapat mendirikan pabrik, membeli mesin, membayar seluruh biaya perusahaan hingga barang-barang benar-benar diproduksi dan dijual. Seluruh proses ini tentu tidak sederhana tetapi itulah esensi kehidupan ekonomi.

Namun ketika pasar keuangan dan sistem perbankan mengalirkan dana/kekayaan ini ke perusahaan-perusahaan yang menggunakannya, modal mengubah dirinya dalam banyak bentuk dan makna. Dalam bentuk surat-surat berharga yang memiliki klaim legal modal tersebut menuntut *profit-sharing*. Dalam lembaga-lembaga keuangan, modal mendapat bentuk yang lebih abstrak lagi yaitu dalam kalkulasi matematis dan definisi-definisi akuntan. Dalam rekayasa finansial di Wall Street, modal muncul sebagai 'utang' sama halnya ketika pemerintah melihat pajak yang harus dibayar oleh warga negara. Sementara itu, dari perspektif pemilik modal, modal tersebut dilihat sebagai 'kemudahan' yang menambah kapitalisasi perusahaan. Dan yang paling menarik, sistem keuangan modern sudah berkembang sedemikian rupa sehingga hanya segelintir orang yang benar-benar mengenalnya dengan baik. Masyarakat umum praktis buta terhadap pergerakan modal tersebut. Greider menulis, "Di Wall Street hanya beberapa orang Amerika yang menangani keuangan. Dan hanya di tangan mereka keputusan-keputusan penting diambil. Mereka benar-benar sangat berkuasa."¹¹ Barangkali kita boleh menambahkan di sini, 'kontrak sosial' sebagai sebuah pemikiran politik yang dikembangkan oleh J. Locke dan kawan-kawannya sekarang tidak lagi berada di tangan pemerintah, tetapi berada di tangan elite yang mengerti rekayasa finansial. Di tangan elite penata rekayasa finansial tersebut, masa depan ditentukan dan diubah. Dengan demikian, kapitalisme modern memang memiliki kekuatan sosial yang riil karena modal tidak hanya memiliki kekuatan ekonomi, tetapi juga kekuatan sosial.

Ketiga adalah pola tingkah laku patologis konsumsi dan produksi. Mengamati pola konsumsi Amerika, Greider mengungkapkan bahwa konsumen Amerika dewasa ini sudah memasuki fase yang kerap disebut dengan konsumsi massa, sebuah pola konsumsi yang ditentukan oleh mimetisme, gairah yang tiba-tiba menghinggapi setiap orang dan mendorongnya seakan-akan sangat penting karena orang lain menganggapnya penting. Melalui iklan, kapitalisme tidak hanya berhasil meningkatkan produksi, tetapi juga meningkatkan konsumsi sampai

¹¹ *Ibid.*, hlm. 96.

antara sosial, politik dan ekonomi, sama seperti norma-norma etis seperti kebebasan individual, kebebasan dari tekanan-tekanan agama dan negara, penciptaan identitas diri dan tanggung jawab pribadi muncul dalam konteks historis tertentu yang tidak memungkinkan manusia bertumbuh dengan baik sebagai manusia.

Dalam tugasnya sebagai pemberi jawaban atas konteks sosial dan kepentingan-kepentingan sosial ekonomis tertentu etika tidak cukup bertujuan teoritis merumuskan prinsip-prinsip universal, tetapi mengambil langkah praktis sebagai sebuah pemecahan masalah dengan metode negasi. Pertanyaan pokok yang harus dijawab dengan metode negasi tersebut adalah apakah moralitas yang dianut selama ini memang membebaskan, terutama membebaskan diri dari 'bisnis kotor' unsur-unsur ideologis. Dalam pendekatan negasi tersebut, etika tidak lagi sibuk dengan pertanyaan apa yang seharusnya dilakukan, tetapi memfokus pada pertanyaan apa yang tidak harus dilakukan. Untuk menghilangkan penderitaan dan mencapai kehidupan yang baik maka tidak boleh ada lagi Auschwitz, tidak boleh lagi ada penjajahan, tidak boleh ada lagi pembunuhan dan tidak boleh ada lagi alienasi kultural dalam globalisasi ekonomi. Inilah inti dari dari *minima moralia*. Dengan konsep *minima moralia* tersebut Adorno ingin menarik perhatian kita dari usaha mencari pendasaran moral sebagaimana dilakukan oleh para filsuf sebelumnya seperti Kant, Hegel, dan Nietzsche, kepada usaha menemukan imperatif baru: apa yang seharusnya tidak boleh terjadi. *Minima moralia* dalam pandangan Adorno adalah hasil dari sebuah refleksi atas pengalaman historis.¹⁹

Dengan imperatif *minima moralia* Adorno sebenarnya ingin mengantar kita kepada gagasan impuls moral dan solidaritas sosial sebagai respons atas pengalaman-pengalaman pahit yang dialami manusia sebagai akibat globalisasi ekonomi. Namun demikian, kapitalisme dewasa ini tidak lagi sekedar subsistem dari sebuah sistem kebebasan yang lebih luas sebagaimana dikemukakan Hayek, tetapi sebuah sistem budaya yang memiliki pengaruh yang luas pada segi-segi kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat dan sebagai pribadi. Karena itu selain pendekatan negasi yang mendorong solidaritas sosial pertanyaan pokok yang harus dijawab sekarang adalah bagaimana individu membuat pilihan-pilihan rasional dalam konteks mekanisme pertukaran pasar yang menonjolkan regim hak milik serta norma-norma tingkah laku dan prosedur-prosedur politik yang justru memperkuat kapitalisme? Dapatkah pengambilan

¹⁹ Gerhard Schweppenhauser, "Adorno's Negative Moral Philosophy" dalam Tom Huhn (ed.) *The Cambridge Companion to Adorno* (New York: Cambridge University Press, 2004), hlm. 328-349.

pada tingkat paling menyenangkan. *Everyone gets to shop* bisa dilihat sebagai sebuah kenyataan baru masyarakat modern dewasa ini. Dengan menjadikan konsumen sebagai raja, kapitalisme berhasil menentukan pilihan. Yang tak pernah terpikirkan bahwa pola konsumsi seperti ini adalah implikasi bagi eksploitasi alam. Mengutip *National Geographic* dalam laporan milenial menjelang tahun 2000, Greider mengungkapkan bahwa kurang lebih 50% dari kekayaan flora dan fauna dunia mengalami kepunahan karena pola konsumsi yang tidak rasional ini. Karena itu ia menulis: “Melampaui ilmu pengetahuan, melampaui ekonomi, krisis ekologis, di atas semuanya, merupakan sebuah tes karakter – karakter orang-orang Amerika.”¹² Kapitalisme yang memiliki nilai produktivitas, kompetisi dan efisiensi ternyata menjadikan konsumerisme sebagai instrumennya. Dengan instrumen tersebut karakter manusia benar-benar berubah: dari manusia yang mencintai taman firdaus yang kaya akan keanekaragaman hayati menjadi penguasa atas alam.

Melihat efek-efek kapitalisme tersebut pantas kiranya kita mempertanyakan kembali apa yang menjadi semangat dasar kapitalisme. John Maynard Keynes dalam artikel “The Economic Possibilities for Our Grandchildren” menulis bahwa “kapitalisme telah mengubah surplus kekayaan menjadi investasi. Dibantu oleh temuan-temuan ilmiah dan teknik-teknik produksi, proses kreasi kekayaan tersebut secara menakjubkan mengurangi penderitaan manusia.”¹³ Dengan catatan ini Keynes yakin bahwa sebuah masyarakat yang baik adalah sebuah masyarakat yang bebas, minimal bebas dari kecemasan dan perjuangan-perjuangan hidup. Dalam semangat sebuah cita-cita masyarakat yang bebas tersebut muncul kapitalisme. Namun, yang tidak diperhatikan oleh Keynes adalah masyarakat yang bebas tersebut tidak dengan sendirinya muncul, jika pasar dalam semangat kapitalisme telah mengarahkan masyarakat ke arah yang berbeda, sekurang-kurangnya menjadi pelayan kehendak pasar.

Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Theodore Adorne bahwa budaya kapitalisme dewasa ini sedang memasuki tahap ironi. Sumber ironinya adalah lenyapnya kesadaran individu untuk mengambil sikap kritis terhadap budaya kapitalisme itu sendiri. Dalam pandangan Adorno, kita sekarang mengalami alienasi tingkat dua: “alienasi dari alienasi kita sendiri.” Pada tahap pertama, kita mengalami alienasi terhadap pekerjaan kita dan diri kita sendiri. Arnsperger¹⁴ menyebut

¹² *Ibid.*, hlm. 155.

¹³ Dikutip oleh Greider dalam *Ibid.*, hlm. 16.

¹⁴ Christian Ansperger, *op. cit.*, hlm. 657-660.

alienasi jenis ini dengan nama ‘alienasi tebal’. Ini dialami oleh para buruh di pabrik-pabrik sebagaimana digambarkan oleh Karl Marx pada abad ke-19 di Eropa. Pada tahap kedua, pengalaman alienasi menjadi lebih mendalam lagi, yaitu justru ketika kita menyetujui begitu saja norma dan interaksi dalam era globalisasi ekonomi dewasa ini. Arnsperger menyebutnya dengan nama ‘alienasi halus.’ Jenis alienasi ini hampir tak terasakan, karena kita terjebak dengan keyakinan bahwa kapitalisme menawarkan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk berhasil dan kegagalan hanyalah sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang salah dengan individu. Jebakan ini benar-benar dahsyat karena setiap orang akan percaya begitu saja bahwa kegagalan tidak lebih dari akibat dari kelemahan ontologis manusia, bukan kelemahan budaya kapitalisme. Keyakinan atas keunggulan budaya kapitalisme ini membuat banyak orang tidak kritis lagi pada kapitalisme, termasuk kroni kapitalisme yang berkembang di banyak negara.¹⁵

Apakah Etika Dapat Diandalkan?

Menghadapi masalah-masalah budaya dan moral irrasional sebagaimana dipaparkan di atas, setiap sistem rasional seperti etika dapat menjadi sebuah “ilmu yang melankoli” jika sistem tersebut tidak mengubah dirinya sebagai sebuah refleksi kritis. Demikian Adorno menulis dalam *Minima Moralia*: “Setiap orang pernah mendengar hubungan antara represi dan moralitas sebagai pemurnian instingtual. Tetapi gagasan moral tersebut tidak hanya menekan insting, tetapi lebih dari itu berasal dari eksistensi supresor.”¹⁶ Adorno menunjukkan pandangannya yang pesimistis terhadap etika. Dalam masyarakat kapitalis dewasa ini, etika cenderung menjadi sebuah ilmu yang tidak bergigi karena sistem moralitas yang ada di dalamnya memiliki hubungan yang erat dengan tindakan-tindakan represi.

Kritik Adorno terhadap etika ini tentu tidak memaksudkan bahwa etika tidak dapat diandalkan lagi. Adorno hanya ingin menunjukkan bahwa seluruh bangunan etika yang kita miliki dewasa ini secara tidak langsung menjebak kita dalam mentalitas kapitalis yang menjunjung tinggi konsep hak milik. Sejak Homer, demikian Adorno menjelaskan, konsep kebaikan memiliki hubungan sangat erat dengan kekayaan. Kata Yunani *kalokagathia* yang dilihat oleh kaum humanis Eropa sebagai model kehidupan harmoni estetis-moral memiliki makna kepemilikan. Demikian juga karya *Politik* Aristoteles secara jelas mengungkapkan

¹⁵ Arnsperger memberikan contoh CEO Enron di Amerika Serikat pada masa pemerintahan G. Bush.

¹⁶ Theodore Adorno, *Minima Moralia* (London: Verso, 2005), hlm. 184.

hubungan yang erat antara keutamaan dan kekayaan tersebut. Kebangsaan merupakan model utama dari setiap warga negara yang baik: pribadi yang memiliki keutamaan moral memiliki juga kekayaan. Selanjutnya, meskipun gagasan ini disangkal oleh kekristenan dengan argumentasi bahwa lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk surga, kekristenan pun memahami bahwa moralitas kepemilikan menjadi proposisi untuk memahami kemiskinan.

Lebih dari itu seluruh sejarah filsafat modern telah memberikan legitimasi pada konsep hak milik sebagai sebuah unsur pembeda antara masyarakat modern dan masyarakat nomadik. Jika dalam masyarakat nomadik, setiap orang dapat melawan semua karena seluruh kehidupan serba tidak teratur, maka masyarakat modern menjadikan konsep hak, terutama hak milik sebagai titik sentral dari norma-norma masyarakat lainnya. Manusia yang baik adalah ia yang mengatur dirinya sendiri sama seperti ketika ia mengatur miliknya. Maka “menjadi baik dan memiliki barang berkaitan erat sejak awal.”¹⁷

Dengan ilustrasi ini, Adorno ingin mengatakan bahwa masyarakat dan individu secara tak tersadarkan terjebak dalam motif-motif ekonomi yang menjunjung tinggi kepentingan diri sebagaimana dipikirkan Adam Smith. Dalam jebakan ini, ia meramalkan bahwa masyarakat modern dapat menjadi materialistis. Ciri-ciri masyarakat ini dapat diungkapkan sebagai berikut: kekayaan pribadi tidak dapat dipisahkan dari kemajuan sebuah masyarakat, orang-orang kaya dapat menjadi pengontrol seluruh sistem produksi, dan kemajuan teknik yang dinikmati oleh masyarakat menjadi milik orang-orang kaya. Dalam masyarakat seperti inilah etika menjadi tidak efektif mengubah masyarakat menjadi lebih baik; ia bahkan tidak dapat diandalkan sebagai pemecah masalah korupsi, kriminalitas, kekerasan masyarakat. Secara sinis Adorno menulis: kita tidak mungkin memikirkan “kehidupan yang benar” dari hidup yang tidak benar yang dibangun dalam masyarakat dewasa ini.¹⁸

Dalam latar belakang masyarakat kapitalis seperti dewasa ini, Adorno mau menegaskan bahwa etika harus menjadi sebuah refleksi atas moralitas. Sebagai sebuah sistem rasional, etika memang berbicara tentang norma-norma moral, namun, ia menambahkan, norma-norma moral tersebut tidak pernah boleh menjadi hasil dari kesimpulan historis di satu sisi, dan bukan juga sebagai dogma-dogma a priori di sisi yang lain. Sebaliknya, etika harus menjanjikan bahwa norma-norma moral dan sosial tersebut merupakan sebuah respons atas struktur interaksi

¹⁷ *Ibid.*, hlm.185.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 39.

keputusan demokratis yang terdesentralisasi menjadi jawaban atas masalah-masalah tersebut? Atau dengan perkataan lain, apakah usaha-usaha kolektif perlu diarahkan agar seluruh mekanisme pasar, regim hak milik, dan prosedur politiknya dilaksanakan dalam semangat demokratis?

Eksperimentasi Demokrasi

Pertanyaan-pertanyaan di atas tak mudah dijawab. Kesulitan utama terletak pada ketidakpastian seluruh tatanan institusional masyarakat kapitalis dewasa ini. Mengenai ketidakpastian institusional tersebut Roberto Mangabeira Unger menulis: “Hal krusial yang harus dipikirkan adalah ekonomi pasar, sama halnya dengan demokrasi representatif atau konsep institusional abstrak lainnya, secara institusional tidak pasti atau stabil: ekonomi pasar tidak memiliki satu bentuk institusional yang alamiah.”²⁰ Dengan catatan ini Unger lebih lanjut mengatakan bahwa ekonomi pasar tidak mengenal satu model institusi. Setiap negara memiliki pengalaman sendiri dalam mengembangkan institusi pasar. Dengan demikian memberikan solusi atas kesulitan ekonomi pasar tidak dapat dikatakan sama di semua negara. Yang paling penting adalah memikirkan institusi dan praktik-praktik yang lebih inovatif, lebih bersahabat dan lebih ramah.

Dengan catatan ini, Unger ingin mengatakan bahwa tugas etika bukan menolak pasar, tetapi mereorganisasi ekonomi pasar. Albert Hirschman sendiri pernah mengusulkan agar dalam reorganisasi pasar mekanisme kompetisi keluar (para pedagang dalam negeri harus dapat bersaing dengan pedagang di luar negeri) sebagaimana dikemukakan oleh kaum merkantilis diganti dengan pendekatan baru untuk mendengarkan ‘suara’ dari luar pasar (dimensi non pasar misalnya: sosial, budaya, dan politik). Dalam keyakinan Hirschman, tidak ada pasar yang mengasingkan diri dari konteks sosial. Sebaliknya, pasar selalu muncul berdasarkan kebutuhan-kebutuhan riil masyarakat. Dalam perspektif Hirschman, kita boleh mengatakan bahwa suara masyarakat perlu dilembagakan dalam fungsi-fungsi pasar (katakan, berkaitan dengan masalah tenaga kerja, konsumen, warga negara). Sementara itu di pihak lain, prosedur politik sebuah masyarakat perlu juga diperbaharui sedemikian rupa sehingga pengetahuan lokal dan tradisi cocok dengan mekanisme pasar. Dengan pendekatan ini, ideologi ekonomi pasar seperti kompetisi dan efisiensi memperoleh tempat dalam pertukaran sosial non pasar.

²⁰ Roberto Mangabeira Unger, *False Necessity* (London: Verso, 2001), hlm lxxxvi, sebagaimana dikutip oleh Christian Arnspenger, “Comment peut-on être alter – mondialiste? Cosmopolitanism and the Resistance to Capitalism” *op. cit.*, hlm. 670.

Unger menyebut proses dialog antara pasar dan non pasar sebagai proses eksperimentalisme demokratis. Dalam eksperimentasi demokratis tersebut yang dibutuhkan oleh pelaku dalam sistem budaya kapitalis adalah rancangan bangunan pengalaman desentralisasi dan mekanisme diseminasi yang analog dengan mekanisme pasar. Politik tidak boleh sama dengan pasar, juga tidak boleh ada inisiatif pasar dalam pengambilan keputusan demokrasi. Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah mereformasi prosedur politik dengan budaya kapitalis sedemikian rupa sehingga memberikan sumbangan bagi eksperimentasi desentralisasi dengan norma sosial inovatif oleh kelompok, komunitas dan forum-forum maya dst.

Melihat prosedur keputusan politik dengan cara ini, etika sebagai sebuah refleksi rasional atas norma-norma moral perlu diangkat sebagai sebuah refleksi politik berdasarkan konstruksi demokratis atas norma-norma sosial. Ini berarti dalam menghadapi globalisasi ekonomi yang intinya adalah kapitalisme sebagai budaya, diskursus moral harus diganti dengan diskursus politik, secara tahap demi tahap. Sebagaimana dikatakan oleh Unger sendiri: "Tahap demi tahap, politik transformatif harus menjadi bagian dari rancangan institusional dan kepercayaan yang membentuk rutinitas praktis dan diskursus kehidupan sosial. Bagi seorang eksperimentalis demokratis, politik transformatif menyangkut tiga hal: pertama, sebagai jalan untuk mengambil keputusan; kedua sebagai praktek yang harus digunakan dalam kehidupan sosial jika kita mau membuat masyarakat kita menjadi lebih demokratis dan lebih eksperimental; dan ketiga, sebagai sebuah jalan untuk memberikan efek praktis kepada kebenaran tentang diri kita: bahwa kita secara tak terduga melampaui sistem organisasi sosial dan kultural yang telah kita bangun dan kembangkan."²¹

Karena itu secara paradoksal kita boleh mengatakan bahwa semakin jauh pasar mengalami desentralisasi ke dalam pengalaman-pengalaman lokal, sejauh itu pasar dapat menghasilkan sebuah pola pengorganisasi diri. Sebaliknya pun terjadi: pasar yang mengorganisasikan dirinya dalam pengalaman-pengalaman lokal dan interaksi di antara warga dapat menghasilkan demokrasi. Hubungan timbal balik dapat terjadi karena dalam pemahaman Unger demokrasi tak mungkin terjadi tanpa prosedur persuasi dan keputusan. Prosedur tersebut dapat berjalan dengan baik dalam komunitas yang memiliki pengalaman atas nilai bersama.²²

²¹ *Ibid.*, hlm. xxv-xxvi

²² Roberto Mangabeira Unger, *Knowledge & Politics* (London: The Free Press, 1984), hlm. 267-270.

Penutup

Globalisasi ekonomi, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bukanlah kenyataan yang netral. Di balik globalisasi ekonomi terselubung motif-motif terdalam dari globalisasi ekonomi seperti budaya kapitalisme, regim hak milik, dan konsumerisme. Melihat tendensi-tendensi tersebut, proses globalisasi ekonomi menunjukkan karakter yang khas sebagaimana sudah lama dikemukakan oleh Aristoteles: "Ilmu politik dan ilmu ekonomi berbeda tidak hanya berkaitan dengan wilayah rumah tangga dan kota, tetapi juga dalam fakta bahwa ilmu politik menyangkut sejumlah penguasa, sedangkan bidang ekonomi adalah suatu monarki."²³ Ramalan Aristoteles ini menunjukkan bahwa jika dalam politik, kita masih mendapatkan karakter demokrasi, dalam ekonomi demokrasi masih sebuah angan-angan yang harus dikerjakan dengan menarik ekonomi ke wilayah sosial dan politik. Tanpa menariknya ke wilayah sosial, demokrasi ekonomi tetap memiliki karakter monarki dan demokrasi menjadi sebuah angan-angan. Dengan menelusuri motif-motif paling mendasar budaya kapitalisme, kita seakan-akan kembali pada suasana pra-demokrasi, baik dalam hal kerja, pengembangan modal, maupun dalam mengkonsumsi barang. Individualitas lenyap tanpa arah. Globalisasi ekonomi memiliki karakter monarki, dalam arti mengandalkan seorang raja sebagai sumber keputusan, acuan kegiatan dan inspirasi kehidupan. Dan raja itu adalah kapital.

Dalam suasana tersebut, pendekatan normatif sulit dilihat sebagai jalan keluar yang memadai menghadapi kenyataan globalisasi ekonomi. Ini tidak dimaksudkan bahwa teori normatif sudah ketinggalan zaman. Sebagaimana Unger sendiri menekankan bahwa dalam mengembangkan eksperimentalisme demokratis kita tetap membutuhkan bantuan tambahan. Elemen visioner norma politik dapat memberikan bantuan tersebut. Hanya dengan cara itu proses demokrasi dapat menjadi bagian dari realitas kebudayaan kapitalis. Kita tidak perlu memikirkan alternatif lain selain kapitalisme, karena secara historis kita tidak tahu tentang apa yang paling baik. Yang diperlukan adalah melakukan sebuah eksperimen demokratis dengan mengkonfrontasikan model yang kita miliki dengan model yang lain. Tanpa konfrontasi dengan model yang lain, kita dapat saja terjebak dalam ideologi yang kita ciptakan sendiri, yang dapat menghambat relasi-relasi sosial yang produktif dan sekaligus bersahabat. Melalui interaksi yang efektif dengan model yang lain dalam eksperimen demokrasi, ekonomi dapat menjadi sebuah *sphere*

²³ Aristoteles, *The Complete Works of Aristotle*, edited by Jonathan Barnes, Vol. 2 (Princeton: Princeton University Press, 1995), hlm. 2130.

bagi manusia untuk menjadi manusia.

Tetapi bagaimana etika dapat menjawab persoalan ini, jika masalah pokok yang harus dijawab adalah proses alienasi dari alienasi pengalaman sebagai manusia dalam budaya kapitalisme tersebut. Ansperger mengusulkan agar kapitalisme sendiri mengubah dirinya dari dalam, terutama dengan mengembangkan metode diskusi interaktif 'pemecahan masalah'. Dengan metode ini diharapkan masyarakat mengambil inisiatif untuk menyuarakan ketidakpuasannya secara efektif, mengutarakan kepentingan-kepentingannya sendiri secara sadar berdasarkan aspirasi-aspirasi bersama yang didukung oleh analisis dan diagnosis para kritikus sosial. Tujuannya adalah terciptanya kesadaran kolektif baru bahwa dinamika sejarah yang ditentukan oleh konsentrasi kekuatan ekonomi dan politik kepentingan telah menciptakan budaya kapitalisme dan bahwa sebuah budaya kapitalisme baru harus dibangun di atas norma-norma solidaritas, sikap membatasi diri dalam hal mencari untung, serta pola konsumsi yang sadar akan dimensi sosial dari kehidupan manusia.

Daftar Rujukan

- Adorno, Th. *Minima Moralia*. London: Verso, 2005.
- Aristoteles, *The Complete Works of Aristotle*, edited by Jonathan Barnes, Vol. 2 Princeton: Princeton University Press, 1995.
- Arnsperger, Chr. "Comment peut-on être alter – mondialiste? Cosmopolitanism and the Resistance to Capitalism" *Ethical Perspectives* Vol. 13 No. 4, Tahun 2006.
- Giddens, Anthony. *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press, 1990.
- Goldblatt, D. et.al., *Global Flows and Global Transformations: Concepts, Arguments and Evidence*. Cambridge: Polity Press, 1998.
- Greider, W. *The Soul of Capitalism, Opening Paths to a Moral Economy*. New York: Simon & Schuster, 2003.
- Ristyantoro, R. "Evolusi Pasar: Dari Pasar Tertanam ke Pasar Tercerabut Perspektif Karl Polanyi" *Respons, Jurnal Etika Sosial* Vol. 15 - No. 02 tahun 2010.
- Schweppenhauser, Gerhard. "Adorno's Negative Moral Philosophy" dalam Tom Huhn (editor) *The Cambridge Companion to Adorno*. New York: Cambridge University Press, 2004.
- Stiglitz, Joseph E. *Making Globalization Work*, sebuah terjemahan Indonesia oleh Edrijani Azwardi. Bandung: Mizan Pustaka, 2007.
- Unger, R. M. Unger, *False Necessity*. London: Verso, 2001.
- Unger, R. M. *Knowledge & Politics*. London: The Free Press, 1984.

van Liedekerke. Luc. "Economic Globalization: The Political Challenge"
dalam *Ethical Perspectives* Vol. 7, No. 1 Tahun 2000.